



SKRIPSI

**ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT
TULIS KANTOR PADA PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**

OLEH:

**NAMA : LAILATUL ASRA
NIM : 21080023
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

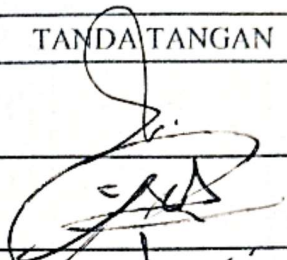
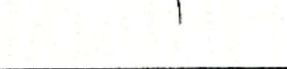
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2024/2025**

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 30 Agustus 2025

Judul : Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada
Pemerintah Kabupaten Agam
Nama : Lailatul Asra
NIM : 21080023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rina Widyanti, S.E., M.Si	Ketua	
2	Puguh Setiawan, S.E., M.Si	Anggota	
3	Fitri Yulianis, S.E., M.Si	Anggota	
4	Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Rina Widyanti, S.E., M.Si
NIDN. 1014098101

Pembimbing II



Puguh Setiawan, SE, M.Si
NIDN. 1007017302

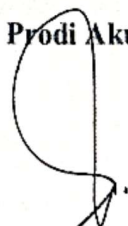
Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi



Immu Puteri Sari, S.E., M.Si
NIDN : 1019098502

Ketua Prodi Akuntansi



Rina Widyanti, S.E., M.Si
NIDN : 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Asra

NIM : 21080023

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 30 Agustus 2025

Yang menyatakan


Lailatul Asra
21080023

HAK CIPTA

Hak cipta milik **LAILATUL ASRA** tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat hidayah serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu yang merupakan tugas dalam menyelesaikan gelar serjana S-1 Akuntansi, dan tak lupa shalawat berangkai salam kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, tanpa beliau manusia tidak dapat mengenal ajaran-ajaran Allah SWT dan tidak akan merasakan nikmat cahaya Islam Iman dan Ihsan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Agam**”. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak menemukan hambatan dan rintangan, namun dengan ketekunan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan bimbingan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik dari moril maupun materi. Ucapan terimakasih ini penulis haturkan kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Bapak Dr. Riki Saputra, M.A Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Puguh Setiawan, SE, M.Si Selaku Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Immu Puteri Sari ,SE, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Ibu Rina Widianti, SE, M.Si Selaku Ka Prodi Akuntansi dan juga Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan menguatkan penulis dengan ilmu dan kebijaksanaan. Tersimakasih atas kesabaran menghadapi keterbatasan penulis.
5. Ibu Fitri Yulianis, SE, M.S dan Ibu Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, AK, CA Selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna. Terimakasih atas waktu dan ilmunya yang sangat berarti.
6. Teristimewa untuk Ayahanda (Iswandi) Dan Ibunda (Fitri Dawati) tercinta, sosok luar biasa yang menjadi pelita dalam hidup penulis. Terimakasih atas cinta, doa, kerja keras, dan pengorbanan tanpa batas. Dalam setiap sujud kalian, aku hidup, dalam setiap peluh kalian aku tumbuh, skripsi ini ku persembahkan untuk kalian rumah yang tak pernah lelah mencintai.
7. Kepada Nailis Sa'adah tante tersayang, yang telah menjadi tempat berpulang saat lelah. Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

yang tulus, bahkan disaat aku tak mengucapkan.

8. Teruntuk Rizky Ananda Z terimakasih telah menjadi tempat bersandar saat lelah datang, menjadi cahaya di tengah gelapnya pikiran, dan menjadi pengingat bahwa semua perjuangan pasti tidak akan sia sia.
9. Ikhwan Agus Saputra, M. Al Hafis dan Syafri Halim, yang selalu memberikan semangat, motivasi serta yang selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Teruntuk Nenek (Farida) dan Kakek (Ajisman) yang selalu mendoakan dalam setiap sujudnya, memberikan semangat, kasih sayang, dan menjadi sumber kekuatan moral selama penulis menjalani proses pendidikan. Terimakasih atas cinta yang tidak pernah putus dan segala pengorbanan yang tidak ternilai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, demikian pula penulis menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini, disebabkan masih dangkalnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi terciptanya sebuah skripsi yang lebih baik dan sempurna.

Padang, 6 Agustus 2025

Penulis

Lailatul Asra
Nim: 21080023

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Agam

Lailatul Asra

Nim: 21080023

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: lailatulasra2@gmail.com

ABSTRAK

analisis standar belanja (ASB) merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun analisis standar belanja khususnya untuk kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari DPA-SKPD Pemerintah kabupaten Agam. data primer berupa wawancara dengan kepala bidang anggaran dan sebagian staf serta pejabat terkait. hasil penelitian ini berupa persamaan analisis standar belanja alat tulis kantor di mana dipengaruhi oleh kegiatan penyediaan belanja tetap dan variabel belanja tetap. variabel belanja untuk kegiatan ini dipengaruhi oleh besarnya kegiatan, untuk membuat analisis standar belanja kegiatan penyediaan alat tulis kantor dikelompokkan menjadi 9 fungsi layanan pemerintah yang terdiri dari layanan ekonomi, fungsi pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perlindungan, layanan publik dan fasilitas perumahan, layanan listrik dan layanan desa. verifikasi kewajaran perhitungan berdasarkan formula model belanja analisis standar belanja pada 9 fungsi layanan pemerintah menunjukkan bahwa nilai belanja yang terdapat dalam DPA masing-masing SKPD dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja. diharapkan penelitian ini memberikan gambaran kepada tim anggaran pemerintah daerah kabupaten Agam untuk meningkatkan kinerja penganggaran di masa mendatang.

kata kunci: analisis standar belanja, total aktivitas, dan fungsi pelayanan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggariskan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Agam

Lailatul Asra

Nim: 21080023

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: lailatulasra2@gmail.com

ABSTRACT

Standard Expenditure Analysis (ASB) is a guideline used to analyze the reasonableness of the workload or costs of each activity carried out by a Regional Government Agency (SKPD) within a fiscal year. The purpose of this study is to compile a standard expenditure analysis, specifically for the provision of office stationery (ATK). The data used in this study are secondary data obtained from the DPA-SKPD of the Agam Regency Government. Primary data include interviews with the Head of the Budget Division and some staff and related officials. The results of this study are in the form of an equation for standard expenditure analysis of office stationery, which is influenced by the provision of fixed expenditure activities and fixed expenditure variables. The expenditure variables for this activity are influenced by the size of the activity. To create a standard expenditure analysis of office stationery provision activities, they are grouped into nine government service functions: economic services, health services, education services, protection services, public services and housing facilities, district services, and village services. Verification of the reasonableness of calculations based on the formula for the standard expenditure analysis model for the nine government service functions shows that the expenditure values contained in the DPA of each SKPD can be approved based on reasonableness criteria. It is hoped that this study will provide an overview for the local government budget team of the Agam Regency Government to improve budgeting performance in the future.

Keywords: *analysis of spending standards, total activities, and government service functions.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Teoritis	9
2.1.1 Keuangan Daerah	9
A. Pengertian Keuangan Daerah	9
B. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	12
2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	13
A. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	13
B. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
C. Prosedur Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	15
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	18
A. Pengertian APBD	18
B. Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	19
C. Jenis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	19
D. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
E. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
2.1.4 Analisis Standar Belanja	21
A. Pengertian Analisis Standar Belanja	21
B. Konsep Analisis Standar Belanja (ASB)	22
C. Dasar Hukum Analisis Standar Belanja.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

D. Tujuan Analisis Standar Belanja	24
E. Manfaat Analisis Standar Belanja	25
F. Peranan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	26
G. Prinsip penyusunan Analisis Standar Belanja.....	26
2.1.5 Alat Tulis Kantor	27
A. Pengertian Alat Tulis Kantor.....	27
B. Jenis-Jenis Perlengkapan Alat Tulis Kantor	27
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	32
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Objek Penelitian.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Agam.....	37
4.1.3 Bagan Struktur Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Kabupaten Agam	38
4.2 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Agam.....	41
4.3 Proses Penyediaan Analisis Standar Belanja Alat Tulis Kantor	45
4.4 Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4. 1 Bagan Struktur Tim Penyusun ASB Kabupaten Agam	39

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu	28
--------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia memerlukan penerapan prinsip-prinsip tersebut di seluruh instansi pemerintah. Reformasi sektor publik, yang mencakup tuntutan akan proses demokrasi, telah menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Tuntutan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah (Rosika & Frinaldi, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membahas tentang prinsip pengelolaan keuangan daerah, perencanaan keuangan, implementasi anggaran, akuntabilitas dan pelaporan, serta pengawasan, tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan ditingkat daerah, yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif serta berfokus pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kepentingan publik. Dalam konteks penyusunan anggaran daerah, peraturan ini memberikan arahan yang relevan. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Daerah harus didasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja (Fadilah, 2009).

Dengan penerapan anggaran kinerja, anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu alat yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan ini adalah Analisis Standar Belanja (ASB). ASB merupakan evaluasi terhadap kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasal 93 ayat 4 permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini mencakup kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran dan memastikan bahwa semua aktivitas serta pengeluaran daerah dicatat dengan baik (BPK, 2006)

Aspek krusial yang perlu dipahami adalah bahwa ASB tidak bertujuan untuk menentukan standar bagi seluruh jenis program belanja dan kegiatan, melainkan hanya untuk kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait setiap jenis kegiatan serta sifat belanja yang menyertainya (Widyanti, 2014).



Pemahaman ini didasarkan pada pengelompokan kegiatan dan konsep klasifikasi biaya (belanja). Besaran belanja setiap kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu (*cost driver*), yang bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Kemampuan untuk mengelola faktor-faktor pemicu ini menjadi kunci utama keberhasilan suatu organisasi (Widyanti, 2015).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin mengalokasikan anggaran untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK) dalam rangka mendukung program dan kegiatan selama anggaran satu tahun. Anggaran belanja ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun penerapan alokasi anggaran sesuai dengan ASB belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Agam, terutama dalam pengalokasian belanja untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

ASB telah diperkenalkan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut, istilah yang digunakan adalah Standar Analisis Belanja (SAB), yang berarti penilaian kewajaran terhadap beban kerja dan biaya untuk kegiatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Kementerian Dalam Negeri (kepmendagri) kemudian mengeluarkan pedoman operasional yang tertuang dalam kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman umum pengelolaan keuangan daerah. Pedoman ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mencakup pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah, Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan Anggaran Daerah. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menjelaskan tentang bentuk ASB. ASB memiliki arti yang sama dengan Standar Analisis Belanja (SAB), yaitu penilaian terhadap kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan (Galih, 2016).

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah diterbitkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Undang- Undang ini kembali menegaskan pentingnya peran ASB sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang juga menekankan pentingnya penerapan ASB dalam pengelolaan tersebut. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2018 diikuti oleh permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang membahas pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Permendagri terbaru menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan menggantikan permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berbagai regulasi selalu menyertakan ASB sebagai salah satu instrumen utama dalam anggaran berbasis kinerja, namun kenyataannya ASB menjadi konsep yang abstrak bagi pemerintah daerah di Indonesia. Dalam konteks anggaran pemerintah, perdagangan barang dan jasa, termasuk Alat Tulis Kantor, diatur melalui analisis standar belanja yang



ditetapkan secara formal oleh pemerintah.

ASB merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban atau biaya setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan alokasi anggaran memadai untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK), dengan tujuan menghindari pemborosan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran (Widyanti, 2014).

Untuk menyusun model ASB kegiatan ATK dikelompokkan berdasarkan Sembilan fungsi pelayanan pemerintah yang terdiri dari fungsi pelayanan ekonomi, fungsi pelayanan kesehatan, fungsi pelayanan pendidikan, pelayanan perlindungan, pelayanan umum, pelayanan pariwisata dan keamanan, pelayanan fasilitas umum dan perumahan, pelayanan kecamatan serta pelayanan kelurahan (Widyanti, 2014).

Di Kabupaten Agam, penyediaan alat tulis kantor menjadi salah satu fokus dalam perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap standar belanja yang digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. pengelolaan belanja pemerintah pada level lokal seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari perencanaan yang kurang tepat, penyediaan yang tidak efisien, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun ataupun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dalam banyak kasus, standar belanja yang diterapkan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, baik karena kurangnya kajian mendalam atau akibat perbedaan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan anggaran yang terbatas. Akibatnya, penyediaan barang seperti ATK seringkali tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah dituntut untuk mengelola anggarannya secara efektif, sehingga setiap pengeluaran dapat memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Dalam konteks penyediaan ATK, hal ini berarti bahwa pemerintah harus mampu menyediakan ATK yang memadai tanpa melakukan pengeluaran yang berlebihan (Bidayatul Faizah, 2019).

Disisi lain, teori pengelolaan sumber daya pemerintah menekankan pentingnya manajemen yang transparansi dan akuntabel terhadap sumber daya publik. Penyediaan barang dan jasa, seperti ATK harus dikelola secara hati hati agar dapat memenuhi kebutuhan administrasi efisiensi. Penerapan standar belanja pemerintah (SBP) dalam penyediaan ATK di kabupaten agam juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur secara umum hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk bagaimana dana daerah dialokasikan dan dikelola. Oleh karena itu, penggunaan SBP dan penyediaan ATK harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut (Kharisma Yosi Noviana & Haryanto, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kabupaten agam merupakan sebagai salah satu kabupaten yang berada di provinsi sumatera barat, yang memiliki struktur pemerintah yang otonom dengan kewajaran untuk mengelola anggarannya sendiri. Penyediaan barang, termasuk ATK, dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya kerap terjadi kendala dalam menentukan standar belanja yang tepat, terutama terkait dengan fluktuasi harga barang dan pearubahan kebutuhan operasional kantor. Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan di kabupaten agam bertujuan untuk mengidentifikasi apakah standar belanja yang telah diterapkan sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Penelitian ini juga akan melihat bagaimana kebijakan penyediaan ATK diterapkan di lapangan, serta mengkaji apakah alokasi anggaran yang disediakan telah memadai untuk memenuhi kebutuhan kantor secara berkelanjutan.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengetahui apakah standar belanja yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Agam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana penyusunan analisis standar belanja (ASB) alat tulis kantor pada pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat”?**

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyusunan analisis standar belanja (ASB) alat tulis kantor pada Kabupaten Agam Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam memahami ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai analisis standar belanja kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literature mengelola keuangan daerah, khususnya terkait analisis standar belanja dan efektivitasnya dalam mendukung kegiatan pemerintah. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan mengenai penganggaran yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja operasional, khususnya pada kegiatan alat tulis kantor. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengindahkan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.